

# ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM 2013

## **Desti Nurholis**

Universitas slam Negeri Raden Fatah Palembang  
[desti.nurholis15@gmail.com](mailto:desti.nurholis15@gmail.com)

## **Nyayu Khodijah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[nyayukhotijah@radenfatah.ac.id](mailto:nyayukhotijah@radenfatah.ac.id)

## **Ermis Suryana**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[ermisuryana\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ermisuryana_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstrak :**

Kurikulum merupakan alat yang penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa disekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh Ijazah tertentu, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu lembaga pendidikan atau jurusan. Kebijakan Kurikulum 2013 merupakan usaha pemantapan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang salah satu kebijakannya berbunyi untuk penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pembelajaran. Dasar kebijakan perubahan kurikulum 2013, elemen-elemen perubahan, dan implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. kebijakan perubahan kurikulum 2013 didasarkan pada tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang.

**Kata Kunci :** Kurikulum, kebijakan K-13

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas manusia yang dimiliki suatu bangsa. Salah satu cara menilai pendidikan adalah dengan melihat sistem pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan adalah komponen pendidikan yang dianggap mampu menentukan kualitas manusia kedepannya. Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah

berfokus pada pendidikan karakter dengan dilakukannya penilaian dalam semua bidang mata pelajaran yang diampu siswa.

Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia paling tidak telah mengalami sebelas kali dinamika perubahan. Dimulai dari masa prakemerdekaan dengan bentuk yang sangat sederhana, dan masa kemerdekaan yang terus menerus disempurnakan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan tahun 2013. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini kurikulum sebagai produk kebijakan bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif. Dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, dan relatif sebab kebijakan kurikulum yang dihasilkan dipandang bagus atau sempurna pada zamannya, dan akan menjadi tidak relevan pada zaman-zaman berikutnya. Oleh karenanya prinsip dasar dalam kebijakan kurikulum adalah *change and continuity* yaitu perubahan yang dilakukan secara terus menerus.

Kebijakan perubahan Kurikulum 2013 merupakan sebuah *ikhtiar* dan wujud dari prinsip dasar kurikulum *change and continuity* tersebut, yaitu hasil dari kajian, evaluasi, kritik, respon, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi. Kurikulum 2013 diyakini sebagai kebijakan strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Kebijakan kurikulum 2013 akan mampu memerankan fungsi penyesuaian (*the adjusted or adaptive function*), yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah kompetensi yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dalam implementasinya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>1</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

<sup>2</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Kebijakan Kurikulum 2013

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, dan partai politik. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.<sup>3</sup> Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.

Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindakannya pemerintah atas sesuatu masalah, baik yang lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi tersebut diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah public dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.<sup>4</sup> Kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan, beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi lain diartikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar-pakar tersebut. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni “*Curricula*”, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian kurikulum kaitannya dengan pendidikan ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Siswa dapat memperoleh ijazah dengan menempuh suatu kurikulum. Ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lain

---

<sup>3</sup>AS. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, cet. ke-5. (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 893

<sup>4</sup>Hessel Nogi S. *Tangkalisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), hlm. 3

<sup>5</sup>Budi Winarno, *Apakah Kebijakan Publik?: Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2002), hlm. 15

dan akhirnya mencapai garis finish. Kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu.<sup>6</sup>

Pengertian kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Mac Donald mengungkapkan jika kurikulum merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.<sup>7</sup> UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>8</sup> jadi Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Menurut Hidayati (2013), kurikulum 2013 merupakan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum 2013, perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi karakteristik, pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 mencakup 3 kegiatan pokok yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.<sup>9</sup>

Prinsip dasar dalam kurikulum 2013 adalah 'penekanan terhadap kemampuan guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang otentik, dan bermakna bagi peserta didik sehingga berkembang potensi peserta didik'. Kurikulum 2013 mendefinisikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai kriteria terkait 'kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan'. Acuan 'penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada pasal 36 Undang-undang No. 20 tahun 2003, yakni penyusunan kurikulum memperhatikan peningkatan keimanan dan ketakwaan, potensi akhlak terpuji, dan minat dunia kerja, teknologi, dan seni, agama, perkembangan global, dan persatuan nasional'.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 16

<sup>7</sup> Nana Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4

<sup>8</sup> 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19

<sup>9</sup> Asniati, dkk, Analisis Kompetensi Guru Kimia dalam Mengimplementasikan Model Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Di SMK Makassar, *Jurnal chemistry Education Review*, vol. 1, no.2. 9 (2018), hlm. 2

<sup>10</sup> Kurniawan, O., & Noviana, E. Penerapan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Keterampilan, sikap, dan Pengetahuan. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 389-396

## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

### Karakteristik kurikulum 2013

Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing, demikian halnya kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah kemasyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertical).<sup>11</sup>

### Landasan Kurikulum 2013

Dalam setiap pengemangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013.

1. Landasan Filosofis
  - a. Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan.
  - b. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.

Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum 2013 sebagai berikut: 1) Pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini

---

<sup>11</sup>Direktor Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Inti Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013* (Jakarta: Australia Aod Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia, 2014), hlm. 10

dan membangun landasan kehidupan masa depan, 2) Pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya, 3) Pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini, 4) Pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, 5) Pendidikan adalah proses pengembangan jatidiri peserta didik, 6) Pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dibidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi.<sup>13</sup>

## 3. Landasan konseptual

Landasan konseptual: 1) Relevansi pendidikan, 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter 3) Pembelajaran kontekstual 4) Pembelajaran aktif 5) Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP Nomor 19 Tahun 2005).<sup>14</sup>

## Dasar Kebijakan Pembentukan Kurikulum 2013

Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu masa prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Berikut ini adalah kaleidoskop kebijakan kurikulum di Indonesia dari masa pra

---

<sup>12</sup>Suarga, *Kerangka Dasar dan Landasan Pengembangan Kurikulum 2013*, Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar, Vol. VI, No. 1, (2017), hlm. 17

<sup>13</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum 2013; Rasional, Kerangka Dasar, Struktur, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum* (Jakarta: Kemendikbud, 2013), hlm. 30

<sup>14</sup>Mulyasa, *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 64

## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

kemerdekaan dimana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas, sampai pada masa reformasi.

### **Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan**

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. Terdapat dua bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial ini yaitu. Pertama, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis dan membaca. Kedua, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat.

Pada jenjang pendidikan menengah didirikan Gymnasium yang siswanya hanya golongan ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Ilmu Hitung, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam atau Kimia, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah dan Tata Buku. Kemudian model pendidikan Gymnasium berubah menjadi MULO (Meer Uifgebried Order Wijs) yang lama pendidikannya 4 tahun. Sedangkan untuk jenjang atau tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS (Algemene Midelbare School). Lama pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun yang terbagi pada bagian A dan B. Bagian A spesifikasinya adalah ilmu kebudayaan yaitu kesusatraan timur dan kesusatraan klasik barat. Sedangkan bagian B spesifikasi pelajarannya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam.

Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, maka kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Kebijakan kolonial Jepang adalah pada pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan Kokumin Gako dengan lama pendidikan 6 tahun. Kebijakan kurikulum pendidikannya lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 17

## **Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan**

Kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pasca kemerdekaan, dibatasi sampai pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diawali dengan terbitnya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 beserta turunan perundang-udangannya. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994.

### **a. Kurikulum 1947**

Awal terbentuknya kurikulum 1947, namanya adalah Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan *leer plan*. Yang menjadi ciri utama pada kebijakan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat.

Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Penekanannya adalah menumbuhkan kesadaran bela negara.<sup>16</sup>

### **b. Kurikulum 1952**

Kebijakan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil kajian Panitia Penyelidik Pengajaran sebelumnya, dan hasil dari Jawatan Pengajaran di Surakarta yang telah menyusun rencana pelajaran terurai pada tahun 1947 namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pelajaran terurai ini merupakan respond dan hasil penyesuaian dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, peserta didik masih diposisikan sebagai obyek, karena guru menjadi subyek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Guru menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.<sup>17</sup>

### **c. Kurikulum 1964**

Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini, kebijakan yang diambil adalah bernama Rencana

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 18

<sup>17</sup>Kunandar, *Implementasi Kurikulum KTSP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 86.



## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pantja Wardhana (Pancawardhana) yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, danmoral. 19 Prinsip-prinsip Pantja Wardhana sebagai sistem Pendidikan adalah 1) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional internasional/keagamaan, 2) perkembangan kecerdasan, 3) perkembangan emosional artistic atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, 4) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan 5) perkembangan jasmani.<sup>18</sup>

### d. Kurikulum 1968

Kebijakan kurikulum 1968 merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

### e. Kurikulum 1975

Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan Pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

### f. Kurikulum 1984

Kebijakan kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975). Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri 1) berorientasi pada tujuan pembelajaran (instruksional), 2) pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning (SAL)*, 3) materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, 4) menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, 6) menggunakan pendekatan ketrampilan proses (*process skill approach*). Karena sifatnya yang senralistik, kurangnya sosialisasi dan minimnya daya dukung implementasi kurikulum maka banyak sekolah yang kurang mampu menterjemahkan, dan menerapkan CBSA, sehingga pad akhirnya banyak penolakan terhadap kurikulum ini.

---

<sup>18</sup> Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 4

g. Kurikulum 1994

Kebijakan terhadap kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pada Kurikulum ini menekankan pada prinsip *Link and Match* pada sekolah kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah). *Link and Match* adalah prinsip tentang pentingnya beterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Pada akhirnya kurikulum ini banyak dikritik karena Pendidikan menjadi kepanjangan tangan dari proses industrialisasi dan tidak memanusiakan manusia (dehumanisasi).<sup>19</sup>

**Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi**

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi system pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara singkat kebijakan dan bentuk perubahan-perubahan kurikulum masa reformasi adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum 2004 (KBK)

Kebijakan kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Diantara karakteristik utama KBK yaitu: menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.

Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.

b. Kurikulum 2006 (KTSP)

Kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 8

## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan Karangka Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya.

### Kebijakan Kurikulum 2013

Perubahan Kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu *pertama* Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu Adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hards skills* dengan mengasah 3 aspek, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Kedua* Standar Isi (SI), yaitu pada perubahan SI dimana pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Sedangkan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. *Ketiga* Standar Proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan *scientific* yaitu mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengeksplorasi (*exploring*), mengasosiasi (*associating*), dan mengkomunikasikan (*communicating*). Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. *Keempat* Standar Penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes -mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja—menuju penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Memperkuat model penilaian PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal). Dan mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.<sup>21</sup>

Penyusunan kurikulum 2013 pada dasarnya menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik- integratif, dan mengacu pada kurikulum 2006. Beberapa

---

<sup>20</sup>Imam Machali, *Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045*, Jurnal Pendidikan Islam: Vol. IV, No. 1, (2014) hlm. 80

<sup>21</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Umum Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11-12

permasalahan di antaranya: (1) konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (2) belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (4) belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (5) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; (6) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (vii) dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir.

Dengan demikian yang mendasari dikembangkannya kurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006, adalah kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan) yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Selain itu, menurut Mendikbud bahwasanya ada dasarnya zaman selalu berubah.<sup>22</sup> Oleh karena itu kurikulum pendidikan harus pula disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman. Saat ini yang dituntut adalah kurikulum yang lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hapalan semata.

## **Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013**

### **1. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 sebelum Pandemi**

Kebijakan kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan bidang pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dimana pemerintah menambahkan penilaian sikap dalam struktur kurikulum dalam kebijakan kurikulum 2013. Adanya penilaian inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter. Tujuannya agar siswa yang mendapatkan pendidikan kurikulum 2013 tidak hanya mampu menguasai dalam hal kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Namun juga didukung oleh sikap perilaku yang berkarakter.

---

<sup>22</sup>Rusliansyah Anwar, Hal-Hal yang Mendasari Penerapan Kurikulum 2013, *Humaniora Vol.5 No.1 (2014)*, Hlm. 100-101

## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

Implementasi kurikulum merupakan upaya untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan yang dimulai dari proses aktualisasi peraturan, persiapan pelaksanaan dan penerapan langsung kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di dilakukan dengan mencari tahu dan menganalisis karakter daerah dalam proses implementasi kurikulum tersebut. Kebijakan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi merupakan tujuan pembelajaran kurikulum. Dalam kurikulum 2013 peranan guru semakin berkurang, guru hanya menjadi mediator pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang diajarkan. Karena implementasi kebijakan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini menuntun siswa bukan hanya sekedar diberitahu tetapi lebih mencari tahu (*discovery learning*) dan menuntun siswa untuk memahami pelajaran menggunakan berbagai media, yang diwujudkan dengan metode 5M yaitu mengamati (*observing*), menanyakan (*questioning*), menalar (*associating*), mencoba (*experimenting*) dan mengkomunikasikan (*creating networking communicating implementating*).<sup>23</sup>

Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah pelaksana kurikulum 2013 menunjukkan sikap positif terkait penerapan kurikulum 2013. Sikap tersebut tercermin dari pemahaman dan pengertian yang baik dari para implementor, respon terhadap kebijakan kurikulum 2013 juga bagus yaitu sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menyertakan keterlibatan masing-masing sekolah sebagai pihak first line yang langsung berhadapan dengan sasaran implementasi kurikulum 2013. Hal ini mendorong terlaksananya kebijakan kurikulum dengan baik, sehingga dapat dikatakan sikap implementor dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mendukung terlaksananya implementasi kurikulum tersebut. Temuan ini memperkuat teroi yang dikemukakan oleh Edward II bahwa jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang akan dilakukan, akan tetapi harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Van Meter dan van Horn, yang menyatakan bahwa proses implementasi akandipengaruhi oleh sikap dari pelaksana kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak menurut kedua ahli ini sebagai konsep penting dalam prosedur implementasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Ayu Novia Hariatiningsih, *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 2, (2016), hlm. 67

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 68

## 2. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 pada Masa Pandemi

Kurikulum 2013 merupakan bagian terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang di dalamnya terdapat tujuan pendidikan nasional yaitu dapat mencetak generasi yang berkarakter serta dapat menyeimbangkan antara kemampuan *hardskill* dan *softskill* pada diri setiap peserta didik. Sekolah memiliki peran yang tinggi dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang tercantum dari surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang dimana mengharuskan proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 dilakukan secara jarak jauh atau biasa dikenal dengan sistem online/ daring menggunakan bantuan internet melalui beberapa aplikasi belajar yang sesuai serta mendukung. Penerapan kurikulum 2013 pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi guru maupun siswa. Selama masa pandemi Covid-19 menerapkan dua metode pembelajaran yakni secara daring dengan melalui WhatsApp grup pada setiap kelas serta secara luring tatap muka di sekolah dengan durasi waktu maksimal 2 jam yang dilakukan dua kali seminggu dengan pembatasan jumlah siswa yang dibagi ke dalam beberapa kelompok dari setiap kelas, pada penerapan pembelajaran secara luring bisa berubah sesuai dengan kondisi serta keadaan di lingkungan madrasah selain itu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta persetujuan dari wali peserta didik. Adapun tahapan pembelajaran kurikulum pada masa pandemi.

### a. perencanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 pada masa pandemi.

Pada perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru adalah dengan menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan silabus yang sudah ada. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan sebuah dokumen yang wajib ada ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada RPP terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, langkah-langkah dalam pembelajaran, media, metode pembelajaran serta penilaian. RPP ini harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung karena RPP ini menjadi acuan atau pedoman guru pada saat mengajar. Dalam perencanaan pembelajaran guru melakukan atau menyiapkan media pembelajaran yang tepat selain itu juga dengan melakukan penyesuaian materi yang akan dipelajari dengan sumber belajar yang ada serta kompetensi yang ada pada RPP. Media pembelajaran yang menarik dapat membangkitkan semangat serta rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Pada pembelajaran secara daring guru menggunakan media berupa gambar serta video

## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

pembelajaran singkat yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran.<sup>25</sup>

- b. pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian dari standar proses dalam perubahan yang ada pada kebijakan kurikulum 2013

Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti serta kegiatan penutup. (Daryanto, 2014: 81) Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran maka didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang harus ditempuh bagi guru maupun siswa dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung yakni pendahuluan, kegiatan inti serta kegiatan penutup. Dalam proses belajar mengajar baik secara daring maupun luring kegiatan pendahuluan atau bisa disebut dengan kegiatan awal dalam pembelajaran yang dilakukan adalah menyiapkan kondisi siswa baik secara fisik maupun psikis dengan sedemikian rupa sehingga siswa siap untuk mendapatkan informasi dari materi yang dipelajari secara bersama-sama baik belajar secara daring maupun luring. Kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan membaca doa, memberi motivasi/semangat serta nasihat yang dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar, selain itu juga dengan mengulang kembali tentang materi apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya.<sup>26</sup>

- c. Penilaian merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran.

Standar penilaian pada kurikulum 2013 berbeda dengan standar penilaian pada kurikulum KTSP 2006. penilaian autentik yang dimana didalamnya terdiri dari tiga aspek penilaian yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Terdapat beragam cara/ metode yang dapat dilakukan dalam melakukan penilaian sikap peserta didik. Penilaian sikap/afektif oleh guru menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung oleh guru itu sendiri dengan mengamati peserta didik keseharian mereka pada saat di lingkungan sekolah maupun pada pembelajaran secara luring, pada pembelajaran secara luring guru juga bekerjasama dengan orang tua siswa maupun wali siswa dalam melakukan Penilaian ini karena guru tidak bisa langsung menilai siswa pada keadaan belajar di rumah. Penilaian keterampilan atau psikomotorik guru menggunakan keterampilan dari unjuk kerja misalnya proyek/kerajinan yang dibuat oleh siswa selain itu juga menggunakan penilaian portofolio. Untuk penilaian hasil belajar siswa dari aspek kognitif maka dapat diambil dari nilai ulangan mingguan, tugas harian serta nilai UAS maupun nilai UTS.

Pada pelaksanaan pengambilan nilai UAS Atau UTS selama masa pandemi ini menggunakan metode yaitu wali murid siswa mengambil soal ulangan ke

---

<sup>25</sup>Siti Masruroh dan Suprapti, *Analisis Permasalahan Standar Proses Kurikulum 2013 Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Simki Pedagogia, Vol. 3 Issue 6, (2020), hlm. 35-36

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 37

Sekolah yang kemudian soal latihan dikerjakan siswa dirumah masing masing dengan pengawasan dari orang tua, berbeda dengan yang lainnya untuk pengambilan nilai ujian pada kelas akhir dilakukan di sekolah hal tersebut karena kesepakatan antara pihak sekolah dengan wali siswa namun dengan menerapkan protokol kesehatan serta membatasi jumlah siswa yang hadir pada hari ujian tersebut. Terdapat permasalahan yang dihadapi guru dalam tahap penilaian pembelajaran ini yakni guru kesulitan untuk melakukan pengambilan nilai peserta didik Karena terdapat banyak aspek yang harus dinilai oleh guru seperti aspek kognitif, psikomotorik serta aspek keterampilan, selain itu untuk mendapatkan nilai hasil belajar siswa guru belum terbiasa dengan metode/ cara yang mudah dilakukan atau digunakan terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelum masa pandemi Covid-19.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagaimana amanat tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19
- Anwar, Rusliansyah. 2014. *Hal-Hal yang Mendasari Penerapan Kurikulum 2013*, Humaniora Vol.5 No.1
- Asniati, dkk. 2018. *Analisis Kompetensi Guru Kimia Dalam Mengimplementasikan Model Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Di SMK Makassar*, Jurnal chemistry Education Review, Vol. 1, No.2
- Direktor Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. *Modul Inti Panduan Pengembangan Kurikulum Madrasah 2013*. Jakarta: Australia Aod Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 39



## Analisis Kebijakan Kurikulum 2013

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2013. *Pedoman Umum*
- Hamalik, Oemar. 2007. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat, Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Rosda
- Hornby, AS. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, cet. ke-5*. Oxford: Oxford University Press
- Idi, Abdullah . 2007. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*,. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta; Kementerian Agama RI  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. *Kurikulum 2013; Rasional, Kerangka Dasar, Struktur, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum* . Jakarta: Kemendikbud
- Kunandar, 2007. *Implementasi Kurikulum KTSP*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniaman, O., & Noviana, 2017. *Penerapan Kurikulum 2013 dalam meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan*. Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 6, No. 2
- Machali, Imam. 2014. *Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045*, Jurnal Pendidikan Islam: Vol. IV, No. 1
- Mulyasa, 2013. *Pengembangan dan iplementasi kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nogi S, Hessel. 2003. *Tangkilisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Novia Hariatiningsih, Ayu. 2016. *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 2
- Siti Masruroh dan Suprapti, 2020. *Analisis Permasalahan Standar Proses Kurikulum 2013 Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Simki Pedagogia, Vol. 3 Issue 6
- Suarga, 2017. *Kerangka Dasar dan Landasan Pengembangan Kurikulum 2013*. Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar, Vol. VI, No. 1
- Sukmadinata, Nana. 2008. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Winarno, Budi. 2002. *Apakah Kebijakan Publik?: Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo